

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI DI KABUPATEN TUBAN
(Studi Kasus di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban)**

Wiwik

12040674005 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: wilokpop@yahoo.com

M.Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP.

0030057606 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pesisir yang masih dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi yang di alami oleh masyarakat pesisir tersebut disebabkan oleh berbagai hal, yang diantaranya adalah kesulitan memperoleh pinjaman modal, masih terbatasnya mobilitas masyarakat pesisir, rusaknya sumberdaya laut, rendahnya kualitas sumberdaya manusia serta masih rendahnya produktivitasnya dan daya saing usaha kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat suatu program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP). Salah satu desa yang menjadi sasaran program ini adalah di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. P2MPP telah dijalankan selama 5 tahun lebih dan menunjukkan beberapa permasalahan yang masih terjadi pada masyarakat di Desa Gadon, salah satunya adalah masih sedikitnya alternatif mata pencaharian masyarakat Desa Gadon.

Untuk melihat bagaimana keberlanjutan P2MPP di Desa Gadon kabupaten Tuban, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang di inginkan, data diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk melihat hasil atau keberlanjutannya peneliti menggunakan teori pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dari Tuwo Ambo (2011). Dalam pendekatan ini terdapat lima *point* untuk melihat bagaimana keberhasilan sebuah program dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Pendekatan tersebut terdiri dari: (1) pengembangan alternatif mata pencaharian baru, (2) akses terhadap modal, (3) akses terhadap teknologi, (4) akses terhadap pasar, dan (5) pengembangan aksi kolektif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, P2MPP telah cukup membantu mengangkat kehidupan masyarakat di Desa Gadon. Hal ini dinyatakan oleh berbagai narasumber, seperti ketua bidang pengembangan perekonomian masyarakat Bapemas Kabupaten Tuban, kepala Desa Gadon, Ketua UPKu, bendahara UPKu, ketua Kelompok masyarakat serta masyarakat. P2MP dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha maupun untuk membuat atau merintis usaha baru sesuai dengan kemampuan masyarakat Desa Gadon. Hal ini juga dapat dilihat melalui terpenuhinya semua indikator atau *point* dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kata kunci: Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, P2MPP

Abstract

Coastal communities Empowerment itself is an attempt to increase the dignity of coastal communities that are still in the conditions have not been able to escape poverty and underdevelopment. Conditions experienced by the coastal community caused by many things, which of them is the difficulty of obtaining a loan, the limited mobility of coastal communities, the damage resources the sea, the low quality of human resources and the limited productivity and competitiveness business maritime affairs and fisheries. Therefore, the provincial government east java make a empowerment program the coastal communities namely the Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai (P2MPP). One village was the target of this program is in the Village Gadon Tambakboyo District of Tuban. P2MPP has been run for 5 (five) years and showed some problems that still occur in the community in the Gadon village, one of which is still at least a livelihood alternatives Gadon village community.

To see how sustainability P2MPP in the village of Tuban district Gadon, researchers used a descriptive qualitative research methods. To obtain the desired data, the data obtained through secondary data sources primary and by observation, interview and documentation. To view the results or sustainability researchers used theoretical approach to empowerment of coastal communities from Tuwo Ambo (2011). In this approach, there are five successive points to see how a program in empowering coastal communities. The approach consists of: (1) the development of new alternative livelihoods, (2)

access to capital, (3) access to technologies, (4) access to markets, and (5) the development of collective action.

The results of this study indicate that, P2MPP been enough to help lift the lives of the people in the village Gadon. This was stated by various speakers, such as the head of the field of community economic development Bapemas Tuban, Gadon village head, UPKu chairman, treasurer UPKu, chairman of the community group and the community. P2MP is used to improve the productivity of businesses and to create or starting a new business in accordance with the community's ability Gadon village. it also can be seen through the fulfillment of all the indicators or a point in a coastal community empowerment approach.

Keywords: Community Empowerment, Coastal Community Empowerment, P2MPP.

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dimana orang akan menjadi lebih kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian – kejadian yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa masyarakat (individu, kelompok) memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehiduannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Edi Suharto, 2009: 57).

Hampir serupa, Prijono & Pranaka mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat berarti memberikan kemampuan dan memandirikan masyarakat. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Dalam hal ini bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal (Prijono &Pranaka, dalam Manat Rahim, 2014).

Menurut Shofwan, Dkk (2008) kebijakan pembangunan di bidang pesisir dan lautan sebagai kebijakan strategis diharapkan dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan martabat masyarakat pesisir serta mampu mensejajarkan diri dengan masyarakat lain. Kebijakan dibangun berdasarkan asas partisipatif dan diarahkan agar rakyat sebagai penerima manfaat terbesar.

Keterkaitan atau relasi antara konsep desentralisasi dengan pemberdayaan masyarakat pesisir juga dijelaskan oleh Eni (2013), yang mengatakan bahwa semangat pengelolaan

sumberdaya kelautan adalah semangat otonomi yang meletakkan daerah sebagai sumbu utama lokomotif pelaksanaannya. Dalam konteks ini, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Kelautannya dengan tujuan utama tentunya pada kesejahteraan daerah dan masyarakat yang ada di dalamnya.

Terkait pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan, sasaran utamanya adalah kepada masyarakat pesisir, baik yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang maupun kepada para istri nelayan. Dalam perkembangannya, pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi kegiatan atau agenda yang begitu penting bagi pemerintah, mengingat kondisi masyarakat pesisir yang dinilai masih rendah. Masyarakat Pesisiran menunjukkan beberapa ciri. Sikapnya cenderung lugas, spontan, tutur kata yang digunakan cenderung menggunakan bahasa ngoko. Keseniannya relatif kasar dalam arti tidak rumit, corak keagamaannya cenderung Islam puritan, dan mobilitasnya cukup tinggi (Ambo, 2011).

Ditambahkan oleh Eni (2013), alasan lainnya mengapa pemberdayaan masyarakat pesisir begitu penting adalah karena dalam pengelolaan sumber daya laut masih di nilai belum optimal. Kekayaan yang ada dalam laut, khususnya di Jawa, hanya sebagian kecil saja dari penduduk masyarakat Pesisir yang berusaha mengaisnya, itupun dalam usaha-usaha kecil seperti kaum nelayan tradisional. Hal ini berarti bahwa konsep laut dan melaut bagi umumnya masyarakat Jawa Pesisir belum mendarah daging. Di samping itu juga gambaran mengenai melakukan kegiatan di laut penuh risiko, sementara gambaran mengenai kondisi kehidupan nelayan masih buram, maka dalam proses sosialisasi dan selama dalam pendidikan, belum ada upaya-upaya untuk diorientasikan kepada kecintaan kepada laut, baik mengenai pengetahuan kelautan, pemanfaatan kekayaan laut, maupun teknologi kelautan. Terbaikannya

kondisi ini mengakibatkan semangat untuk mencintai dan menjadi bangga sebagai pelaut, serta kesungguhannya untuk dapat memanfaatkan kekayaan laut, sangat berkurang.

Menurut Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Tridoyo Kusumastanto (2011), sebagian besar wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah pedesaan dengan 80 persen penduduknya masih dalam kategori miskin. Kondisi ini ditambah dengan kerusakan sumberdaya laut dan pesisir serta sumberdaya alam pada umumnya, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan keterbatasan sarana prasarana desa. Di luar konteks desa, pembangunan wilayah pesisir dan lautan juga tidak dapat berdiri sendiri karena terkait erat dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik bangsa dan dunia pada umumnya. Kawasan pesisir umumnya masih dalam lingkungan yang tradisional, yang dalam hal pembiayaan, pengadaan maupun pemenuhan kebutuhan yang lain masih sedikit sulit, dibanding dengan yang berada di kota.

Lebih lanjut kusumastanto menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi Desa pesisir juga dikarenakan beberapa isu-isu kritis yang melatarbelakanginya. Beberapa isu penting tersebut dibagi menjadi lima ranah, yaitu: ekologi, sosial, ekonomi, agrarian, dan geopolitik. Beberapa isu ini memerlukan penanganan serius terkait dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa pesisir. Berikut adalah tabel mengenai kondisi umum masyarakat pesisir Indonesia yang dikemukakan kusumastanto (2011) :

Tabel 1.1 kondisi umum masyarakat pesisir di Indonesia

No	Kondisi Masyarakat Pesisir	Jumlah
1	Desa pesisir	8,090 desa
2	Masyarakat pesisir	16,420,000 jiwa
-	- Nelayan	4,015,400 jiwa
-	- Pembudidaya	2,671,400 jiwa
-	- Masyarakat pesisir lainnya	9,733,280 jiwa
3	Presentase yang hidup di bawah garis kemiskinan (32,14%)	5,254,400 jiwa

Sumber : DKP (dalam kusumastanto dkk, 2011).

Berangkat dari beberapa isu yang terjadi dalam masyarakat pesisir yang telah di uraikan sebelumnya, maka pemerintah makin serius berupaya untuk mengeluarkan program –

program maupun kebijakan – kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Demikian juga pemerintah daerah Kabupaten Tuban. berdasarkan keadaan geografis Kabupaten Tuban, yang terdiri dari daerah pesisir di sepanjang jalur pantai utara, menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban perlu untuk membuat program terkait dengan pengelolaan potensi-potensi kelautan serta hasil dari laut Kabupaten tuban.

Namun, seiring perkembangannya, menurut kompasiana.com (di unduh pada tanggal 10 Oktober 2015), kawasan pesisir dan pantai di Kabupaten Tuban telah mengalami sedimentasi. Banyak sampah di mana-mana. Kondisinya kotor meskipun di salah satu ruas pantainya, ada taman mangrove. Lebih lanjut disebutkan bahwa kondisi pesisir pantai Tuban masih kurang bergairah. Meskipun telah ada pembenahan, namun belum begitu ramai. Padahal bila dikelola dengan baik, potensi pantai ini begitu luar biasa besarnya, baik potensi wisata maupun potensi produk-produk olahan hasil lautnya. Potensi ini bisa berefek langsung ke masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir.

Pemerintah Kabupaten Tuban masih di nilai belum cukup serius dalam pengelolaan pantai. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Tuban belum memiliki konsep yang matang tentang pengelolaan kawasan untuk mengakomodir pedagang kaki lima (PKL). Konsep-konsep pengelolaan ini akan membantu perekonomian masyarakat serta mampu di nikmati oleh pemerintah dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kelautan di Kabupaten Tuban.

Selain itu, menurut hasil penelitian Shofwan, Dkk (2008), dari hasil survei terhadap 5 kecamatan di Kabupaten Tuban yang mewakili usaha perikanan tangkap dan budidaya baik perikanan laut maupun tawar, menunjukkan bahwa masyarakat pesisir sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Permasalahan utamanya adalah kurangnya modal, kualitas sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kerusakan habitat laut (terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran laut dan sebagainya), kurangnya pemahaman terhadap nilai sumberdaya dan masalah kelembagaan (konflik pemanfaatan dan kewenangan masalah ketidakpastian hukum).

Berdasarkan beberapa fenomena dan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tuban mengimplementasikan program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir. Program ini adalah program dari Badan

Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jawa Timur yang di terapkan di 8 Desa di Jawa Timur, salah satunya adalah di Kabupaten Tuban, khususnya di Desa Gadon. Program ini bertujuan untuk mengentaskan keterbelakangan dan kemiskinan di daerah pesisir di beberapa Kabupaten di Jawa Timur. Program yang telah dilaksanakan tersebut merupakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), yaitu salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan laut Kabupaten Tuban. Sasaran dari program ini adalah kaum ibu-ibu atau istri nelayan dikarenakan, para ibu – ibu inilah yang memiliki kemampuan dan memiliki waktu untuk mengolah hasil laut yang di tangkap oleh nelayan.

Satu-satunya desa di Kabupaten Tuban yang mendapat sorotan dan menjadi sasaran program adalah di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. hal ini di karenakan Desa Gadon telah memenuhi persyaratan implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan persyaratan, antara lain : (1) Usulan lokasi dari Pemerintah Kabupaten, (2) Desa Lokasi yang diusulkan memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat diandalkan yaitu potensi perikanan, potensi pariwisata, potensi transportasi laut dan potensi wilayah pesisir lainnya, (3) Jumlah RTS, sesuai dengan data PPLS Tahun 2008, (4) Ada kesiapan dukungan dalam bentuk dana penyertaan (dana sharing) dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa berupa ruang/tempat sekretariat UPKu dan (5) Adanya respon positif dari Pemerintah Desa terhadap program.

P2MPP telah diresmikan pada tahun 2010. dengan dana bantuan sebesar Rp 90.000.000 dari Provinsi Jawa Timur dan dari Kabupaten Tuban Rp 38.350.000. Dana tersebut dikelola oleh UPKu Maju Bersama. Dengan dana yang disediakan tersebut telah membantu pelaku UMKM di Desa Gadon dalam memenuhi modal usaha masyarakat Desa Gadon. Di ketahui dari Bapemas Provinsi Jawa Timur dalam Gema Desa 2012 bahwa dana tersebut cukup membantu pelaku industri kecil di Desa Gadon.

Pasalnya, dengan dana tersebut, masyarakat Gadon tidak kesulitan mencari pinjaman untuk modal usahanya. Dengan adanya bantuan dana tersebut, masyarakat Desa Gadon yang memerlukan modal atau dana tambahan bisa meminjam dengan bunga ringan,

bahkan sebagian dibebaskan dari bunga. Sehingga, masyarakat pesisir di Desa Gadon tidak bergantung lagi kepada rentenir yang berkeliaran di desa-desa, yang dengan cepat memberi pinjaman, namun bunganya cukup cukup tinggi.

Berdasarkan program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Di Kabupaten Tuban (studi kasus di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban)”. Penulisan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program P2MPP ini terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban melalui program P2MPP?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana keberlanjutan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban melalui program P2MPP.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Untuk mengembangkan teori dalam administrasi Negara serta kajian pustaka dalam kaitannya dengan otonomi daerah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Universitas
dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan yang berupa hasil atau laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dapat digunakan untuk melengkapi penelitian-penelitian sosial yang ada serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang selanjutnya.
 - b. Bagi Mahasiswa,
Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan penelitian sejenis.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk mengetahui bagaimana dan apa itu otonomi daerah, konsep otonomi daerah serta pengertian dan upaya – upaya dalam pemberdayaan masyarakat.

- c. Bagi Instansi Tempat Penelitian,
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk mengembangkan pelaksanaan dan pengelolaan program agar program pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.
- d. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan sumber ilmu pengetahuan tentang otonomi daerah. Selain itu melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat mampu memahami bahwa pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat berkontribusi dan bekerjasama dalam menyukseskan program pemerintah tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Sedangkan, Abdur Rohim (2013), menyatakan dan memberikan gambaran konsep pemberdayaan masyarakat secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (mengutip pendapat edi Suharto, 2009).

B. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Tuwo Ambo (2011) kekurangberdayaan masyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal dan kelembagaan usaha. Selain itu, menurut Ambo (2011) paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang baru saja diimplementasikan. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Komponen dari pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengembangan mata pencaharian alternatif

Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi (Shofwan, Dkk). Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, jika memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan (Ambo, 2011). jika jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.

2) Akses Terhadap Modal

Strategi pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini (Ambo,2011). Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selanjutnya diberlakukan seperti perlu adanya *collateral*, *insurance* dan *equity*.

3) Akses Terhadap Teknologi

Menurut Ambo (2011), upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran. Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi masyarakat lebih maju dari pemerintah.

4) Akses terhadap pasar

Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya

yang dilakukan adalah mendekati masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan (Ambo, 2011). Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas barang bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha

5) Pengembangan aksi kolektif

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama (Ambo, 2011). Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), yang dialokasikan pada 8 Kabupaten, 8 desa pesisir di Jawa Timur. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs 2015, khususnya dibidang perekonomian masyarakat perdesaan, dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip pada pembangunan manusia, keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan

mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari & berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tuban melalui program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai (P2MPP), dengan mengambil studi kasus di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo, yang akan di analisis menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dari Tuwo Ambo (2011). Subjek penelitian terdiri dari Tim pengembangan perekonomian masyarakat Bapemas Kabupaten Tuban, Aparatur Desa serta pihak-pihak pengelola UPKu Gadon dan masyarakat pesisir desa Gadon. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui P2MPP bila ditinjau dari teori pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir

Untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan atau hasil dari pemberdayaan masyarakat di Desa Gadon, peneliti menggunakan teori pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat pesisir (Ambo, 2011). Pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan alternatif mata pencaharian
Menurut Ambo (2011), pengembangan mata pencaharian alternatif dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alasan, antara lain yaitu pertimbangan bahwa secara umum dan khusus sumber daya pesisir dan perikanan telah mengalami tekanan dan degradasi. Sedangkan menurut Sujatmiko (2014) mata pencaharian adalah pekerjaan atau mata pencaharian yang terdiri dari mata pencaharian utama dan mata pencaharian sampingan, mata pencaharian sampingan inilah yang merupakan mata pencaharian alternatif baru, karena keberadaannya yang baru yang digunakan sebagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa

alternatif mata pencaharian lain juga diserahkan langsung kepada pengurus UPKU dan juga pendamping masyarakat untuk meentukan mata pencaharian alternatif lainnya. Untuk mata pencaharian alternatif lainnya tidak hanya bergantung dari pihak Bapemas Kabupaten, namun juga dapat dilakukan oleh pengurus lainnya, yaitu UPKu, sedangkan pihak Bapemas lebih banyak hanya memberikan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara membuat Rencana Anggaran Penerimaan Daerah (RAPD).

Proses dalam memberikan alternatif mata pencaharian baru atau sosialisasi program dilakukan oleh Bapemas dengan melakukan pertemuan antara Bapemas Kabupaten Tuban, kepala Desa Gadon, serta UPKu yang ada di Desa Gadon. Namun setelah berjalan sekitar kurang lebih lima tahun, keberlangsungan alternatif mata pencahariaan baru tersebut, tidak secara pasti diketahui oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tuban. hal ini disebabkan karena pelaporan dari masyarakat tidak lancar, sehingga mempengaruhi proses monitoring.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam P2MPP, pemerintah telah memberikan beberapa alternatif pilihan mata pencaharian baru yang juga di dasarkan pada potensi lokal kawasan pesisir di desa Gadon. beberapa alernatif pilhan yang ditawarkan adalah budidaya ikan Sidat serta Penggemukan Sapi.

2. Akses Terhadap Modal

P2MPP memberikan bantuan modal kepada masyarakat melalui lembaga UPKU (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha). Dengan adanya bantuan modal yang dikelola lembaga ini, maka masyarakat dengan mudah dapat mengakses modal untuk usaha mereka. Menurut Ambo (2011), akses terhadap modal bagi masyarakat pesisir merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya adalah bagi nelayan, karena pada dasarnya masyarakat pesisir sangat sulit untuk memperoleh modal.

menurut ketua Bidang pengembangan perekonomian masyarakat, dana yang selama ini diberikan kepada masyarakat sebagai modal simpan pinjam ternyata masih kurang. Dana ini belum mampu mengcover atau menutupi kebutuhan usaha-usaha masyarakat di Desa gadon. Bahkan ada beberapa laporan, yang mengatakan bahwa ada pinjaman yang macet di salah satu warga. Hasil yang diperoleh peneliti tersebut sesuai dengan pendapat Bagong (2001), yang mengatakan bahwa peran bantuan

permodalan di Indonesia seringkali disalahgunakan oleh masyarakat, namun mengingat kebutuhan masyarakat maka pemberian modal ini terus dilaksanakan.

berdasarkan observasi dan wawancara, serta analisis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa P2MPP di Desa Gadon telah membantu mewujudkan struktur ekonomi Desa Gadon yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut. Di samping kegiatan tersebut, diketahui pula bahwa dengan adanya lembaga UPKu masyarakat semakin terbantu dan merasa senang. Hal ini dikarenakan UPKu merupakan prasarana untuk menggali potensi yang dimiliki dan mempermudah masyarakat melakukan aktiitasnya.

3. Akses Terhadap Teknologi

Menurut Ambo (2011), teknologi yang digunakan masyarakat pesisir umumnya masih bersifat tradisional, sehingga yang terjadi adalah produktivitas masyarakat rendah, dan hal tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat rendah pula. Salah satu upaya pemingkatan pendapatan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan salah satu upaya yaitu dengan memperbaiki teknologi, mulai dari teknologi produksi sampai dengan pasca produksi hingga pemasaran.

Menurut wawancara peneliti dengan ketua Bidang pemberdayaan masyarakat, Bapemas kabupaten Tuban, menyatakan bahwa masyarakat pesisir di Desa Gadon selama ini masih mengandalkan alat-alat tradisional dalam memperoleh tangkapan ikan. Selain itu, masyarakat yang memiliki usaha lain dibidang pembuatan rengginang juga masih menggunakan cara tradisional. Meskipun demikian, P2MPP masih belum memberikan pelatihan-pelatihan dalam menggunakan teknologi modern dalam proses produksinya, namun hanya diberikan pelatihan satu kali saat awal penerapan P2MPP.

Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Gadon masih minim dalam penggunaan teknologi. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjai sasaran proram adalah masyarakat yang termasuk awam dalam penggunaan teknologi. Sehingga masyarakat menjadi enggan untuk mengoperasikan teknologi tersebut, di tambah dengan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat hanya satu kali selama berjalannya P2MPP. Dengan kejadian tersebut maka masarakat Gadon yang awam tadi justru akan semakin bingung dan menjadikan masyarakat semakin enggan untuk menggunakan teknologi informasi tersebut.

4. Akses Terhadap Pasar

membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha masyarakat pesisir karena bila tidak ada pasar maka usaha masyarakat pesisir akan mengalami hambatan (Ambo, 2011). Hal ini tentu menandakan bahwa tidak hanya modal maupun akses teknologi yang perlu ditingkatkan, namun keterbukaan serta luasnya akses pasar juga merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk diwujudkan.

Akses terhadap pasar di Desa Gadon, bergantung dari usaha masyarakat desa Gadon itu sendiri. Menurut ketua Bidang pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Tuban, bahwa masyarakatlah yang mencari pembeli atau konsumen sendiri, sedangkan pihak Bapemas Kabupaten Tuban belum memfasilitasi sampai ke penyediaan mitra dan link dalam memasarkan usaha masyarakat Desa Gadon. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pengembangan Perekonomian Masyarakat Bapemas Kabupaten Tuban, diketahui bahwa masyarakat hanya pernah diarahkan untuk menjual atau memasarkan produknya. Tapa ada pendampingan lagi dalam kaitannya dengan penjualan produk dari masyarakat di Desa Gadon.

Pasar memiliki peran yang sangat penting bagi usaha masyarakat. Menurut Handri (2005), pasar memiliki tiga arti yang berbeda, yaitu: dalam arti sempit, pasar yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen; Dalam arti interaksi permintaan dan penawaran, pasar dijadikan sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli; dan secara umum pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

5. Pengembangan Aksi Kolektif

Menurut pendapat Milgran dan Touch (di kutip oleh Yusron, 2007), perilaku kolektif ialah suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif, tidak terorganisasi serta hampir tidak bisa diduga sebelumnya, proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul dikalangan para pelakunya.

Menurut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Gadon, Ibu Aminatun, salah satu upaya untuk mengembangkan aksi kolektif masyarakat adalah dengan di bentuknya kelompok-kelompok usaha masyarakat, sehingga masyarakat dapat belajar berorganisasi dalam lingkup yang kecil untuk nantinya dapat berkontribusi dalam organisasi yang besar. Pembentukan kelompok usaha di Desa Gadon

dilakukan dengan musyawarah Desa dalam memilih ketua setiap kelompoknya. Bila musyawarah tersebut tidak mendapatkan hasil yang di inginkan maka pemilihan ketua kelompok masyarakat dilakukan dengan cara *voting*. Selain itu, upaya pengembangan aksi kolektif terlihat pada kepengurusan UPKu, yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu, maka aksi kolektif masyarakat di Desa Gadon juga telah diwadahi oleh lembaga masyarakat. Berdasarkan observasi, lembaga yang mewadahi aksi kolektif masyarakat di Desa Gadon ialah LPMD, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lembaga ini yang bertanggungjawab dan merupakan wadah aspirasi bagi masyarakat Desa Gadon.

KESIMPULAN

Sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka kesimpulan dari penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) di Kabupaten Tuban tepatnya di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo, yang di kaji berdasarkan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dari Ambo (2011), yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Alternatif Mata Pencaharian

Pengembangan mata pencaharian alternatif baru di Desa Gadon telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Meskipun menurut pengakuan dari masyarakat serta dari pihak Bapemas Kabupaten, bahwa yang memiliki inisiatif dalam penentuan alternatif adalah dari masyarakat itu sendiri bersama UPKu, dengan cara musyawarah. Sebelumnya juga dilakukan beberapa sosialisasi dahulu dari pihak Kabupaten mengenai P2MPP serta kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan melalui program tersebut oleh masyarakat. Untuk selanjutnya dalam penerapannya diserahkan kembali kepada masyarakat apakah akan dilanjutkan atau akan menentukan kegiatan-kegiatan lain untuk pemberdayaan masyarakat, dengan menggunakan dana yang telah diberikan kepada UPKu, yang berasal dari pemerintah. Menurut observasi dan wawancara dengan Ibu Kepala Desa maupun dengan masyarakat, diketahui bahwa kegiatan usaha di Desa Gadon telah berjalan dengan baik, dan

dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Akses Terhadap Modal

Di Desa Gadon, penyediaan modal di berikan dengan sistem simpan pinjam agar uang diberikan tersebut bisa berputar terus dan tidak berhenti di salah satu warga. Pengelolaan di lakukan oleh UPKu dengan pengelolaan mandiri, dalam artian pengelolaan tersebut dilakukan oleh pengurus UPKu itu saja tanpa ada campur tangan dari pemerintah Kabupaten. Pihak dari Kabupaten dan Provinsi hanya sesekali memantau, bila ada kekurangan atau masalah pendanaan cukup memberikan penguatan modal serta membantu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Gadon. Meskipun pengelolaan dan perputaran dana modal di Gadon sudah cukup baik, namun ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa modal yang diberikan masih kurang. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang masih rendah. Hal ini mengganggu kestabilan perputaran uang di Gadon. Sehingga modal yang diberikan seharusnya cukup, menjadi kurang karena masih berada di salah satu warga.

3. Akses Terhadap Teknologi

Saat pertama kali P2MPP di terapkan di Desa Gadon, masyarakat telah diberikan pelatihan dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan usaha masyarakat Gadon. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak ada kelanjutannya dikarenakan sasaran dari program ini yang merupakan masyarakat dengan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang rendah, sehingga masyarakat masih belum memahami bahwa penggunaan teknologi sangat bermanfaat untuk kegiatan usaha masyarakat. Secara keseluruhan, akses masyarakat terhadap teknologi saat ini telah berkembang ke arah yang lebih positif. Namun, perkembangan ini tidak hanya karena P2MPP, namun juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang sudah mulai berkembang.

4. Akses Terhadap Pasar

Dalam mengakses pasar dan menjangkau pembeli, masyarakat Gadon tidak merasa kesulitan, karena masyarakat sebelumnya telah memiliki pelanggan, maka masyarakat kurang merespon mengenai arahan yang diberikan pemerintah. Masyarakat di Desa Gadon yang sudah memiliki usaha sebelum adanya P2MPP, memang sudah memiliki *link-link* sendiri. Sehingga kesimpulan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk akses terhadap pasar telah terpenuhi, meskipun bukan hanya karena P2MPP.

5. Pengembangan Aksi Kolektif

Pengembangan aksi kolektif di Desa Gadon adalah hal yang paling menonjol selain masalah permodalan. Melalui P2MPP masyarakat menjadi sering melakukan musyawarah dalam menentukan setiap keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan aksi kolektif masyarakat Gadon telah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan UPKu yang mana, dalam pengelolaan ini diserahkan langsung kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mengembangkan aksi kolektif masyarakat lainnya adalah dengan di bentuknya kelompok-kelompok usaha masyarakat, sehingga masyarakat dapat belajar berorganisasi dalam lingkup yang kecil untuk nantinya dapat berkontribusi dalam organisasi yang besar. Pembentukan kelompok usaha di Desa Gadon dilakukan dengan musyawarah Desa dalam memilih ketua setiap kelompoknya.

SARAN

Sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) di Kabupaten Tuban tepatnya di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo, penulis memberikan beberapa rekomendasi dari hasil identifikasi permasalahan pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah tersebut, yaitu:

1. Dalam pemberian alternatif baru, perlu adanya kontrol serta pendampingan agar alternatif yang diberikan bisa berjalan dengan baik. Seperti yang di katakan sebelumnya bahwa kegiatan budidaya serta penggemukkan sapi sudah tidak berjalan. Hal ini tentu memerlukan pemantauan secara berkala agar alternatif tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan.
2. Bagi masyarakat, khususnya pengelola UPKu di sarankan untuk lebih lancar dalam melaporkan kegiatan usaha maupun realisasi peminjaman modal di UPKu. Sehingga pemerintah tidak terlalu kesulitan untuk memantau perkembangan P2MPP di Desa Gadon.
3. Bagi pemerintah, khususnya Bapemas Kabupaten Tuban untuk melakukan monitoring dengan teratur, melakukan pengawasan secara langsung sehingga perkembangan P2MPP dapat di pantau secara maksimal.
4. Bersama-sama antara masyarakat, kepala desa, pengurus UPKu untuk melakukan pertemuan untuk membahas mekanisme pelaporan yang pasti, sehingga tidak ada kesalahan

komunikasi di antara pemerintah dan pengurus UPKu. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sebelumnya bahwa Bapemas Kabupaten Tuban menunggu laporan dari ketua UPKu sedangkan pengurus UPKu juga menunggu pengawas.

5. Agar perputaran modal di Desa Gadon dapat berjalan dengan baik, di sarankan juga kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pengertian serta kesadaran masyarakat bahwa uang yang disimpan pinjaman memang harus dikembalikan.
6. Disarankan pula kepada Bapemas untuk mawadahi usaha masyarakat di Desa gadon tersebut, untuk menyediakan mitra bagi usaha masyarakat, bukan hanya mengarahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan, bila hanya di arahkan, masyarakat akan cenderung bingung dan justru malas untuk melakukan arahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Hendri, Ma'ruf. (2005). *Pemasaran Ritel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Huda, Ni'matul. (2013). *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamal, Eni. 2013. *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Nelayan*. Pusitkom: Universitas Bung Hatta. Online (Di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2015).

Kusumastanto, T & Satria A. (2011). *Strategi Pembangunan Desa Pesisir Mandiri. Menuju Desa 2030*. Bogor: Crestpent Press.

Manat Rahim; Madjiani Tahir; Waly Aya Rumbia. 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara*. Journal The WINNERS, Vol. 15 No. 1, Maret 2014

Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (2013). *Standart Operasioal Prosedur (SOP) P2MPP*.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

- Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (2013). *Standart Pelayanan Publik (SPP) P2MPP*. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.
- Razak, Yusron. (2007). *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Bandung : Gamma Press
- Rohim, abdur. 2013. *Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata (studi di desa wisata Bejiharjo, kecamatan karangmojo, kabupaten gunung kidul, DIY)*. Skripsi. Jurusan pengembangan masyarakat islam, fakultas dakwah dan komunikasi. Universitas islam negeri sunan kalijaga, DIY
- Shofwan, Dkk. 2008. *Pengelolaan Potensi Sumberdaya Kelautan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Community-Based Management Wilayah Pesisir di Kabupaten Tuban)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 2 No. 1 Mei 2008, 102-112.
- Suharto , Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama: Bandung
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media. Cetakan I
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Reinforcement. Action and Development. Banda Aceh.
- Suyanto Bagong. 2001. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Kebudayaan dan politik. Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001, 25-42
- Tuwo, H. Ambo. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya: Brilian Internasional.
- www.kompasiana.com/ (di unduh pada tanggal 10 oktober 2015, pukul 10.20)